

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang 2023-2025)

Lydia Aprilia Pratiwi 22150018, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi
Ilmu Hukum, Universitas Dharma Andalas

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan dan menjadi permasalahan serius yang memerlukan penegakan hukum secara efektif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika yang memenuhi persyaratan tertentu dapat dikenai tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan kecenderungan penjatuhan pidana penjara dibandingkan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Tahun 2023–2025 ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 didasarkan pada adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana, dengan menerapkan *double track system* berupa pidana dan tindakan rehabilitasi sesuai status pelaku. Namun, penerapannya dalam praktik peradilan belum berjalan optimal. Dari sepuluh putusan Pengadilan Negeri Padang yang dianalisis, delapan putusan menjatuhkan pidana penjara, sedangkan dua putusan menerapkan rehabilitasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan represif masih lebih dominan dibandingkan pendekatan rehabilitatif karena pelaksanaan asesmen terpadu belum konsisten, masih terdapat disparitas pertimbangan hakim, dan rehabilitasi belum secara otomatis diterapkan meskipun terdakwa diputus berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Oleh karena itu, diperlukan penerapan asesmen terpadu dan konsistensi pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan rehabilitasi agar tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat terwujud.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, PERMA Nomor 4 Tahun 2023.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL LIABILITY OF NARCOTICS OFFENDERS UNDER LAW NUMBER 35 OF 2009

(A Study of Padang District Court Decisions from 2023 to 2025)

*Lydia Aprilia Pratiwi 22150018 Faculty of Law, Social Sciences and Humanities Undergraduate
Program in Law Dharma Andalas University*

Drug abuse in Indonesia continues to increase and has become a serious problem requiring effective law enforcement. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics stipulates that drug abusers, drug addicts, and victims of drug abuse who meet certain legal requirements may be subjected to medical rehabilitation and social rehabilitation. However, judicial practice still demonstrates a tendency to impose imprisonment rather than rehabilitation. This study aims to analyze the concept of criminal liability for drug abusers under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and to examine the application of criminal liability to drug abusers in the decisions of the Padang District Court during the period 2023–2025, as reviewed under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 4 of 2023. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that the concept of criminal liability under Law Number 35 of 2009 is based on the existence of a criminal act, culpability, criminal responsibility, and the absence of grounds for excluding criminal liability, while applying a double-track system consisting of criminal punishment and rehabilitation measures according to the offender's legal status. Nevertheless, its implementation in judicial practice has not been optimal. Of the ten Padang District Court decisions analyzed, eight imposed imprisonment, while only two ordered rehabilitation. These findings indicate that the repressive approach remains more dominant than the rehabilitative approach due to the inconsistent implementation of integrated assessments, disparities in judicial reasoning, and the fact that rehabilitation is not automatically applied even when defendants are convicted under Article 127 of Law Number 35 of 2009. Therefore, consistent implementation of integrated assessments and greater consistency in judicial reasoning regarding rehabilitation are necessary to ensure that the objectives of sentencing based on justice, legal certainty, and legal expediency can be effectively achieved.

Keywords: *Criminal Liability, Drug Abusers, Rehabilitation, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Supreme Court Regulation (PERMA) Number 4 of 2023.*